Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

Analisis Kesiapan Sosial dan Kelembagaan Nelayan Desa Kurau dalam Implementasi Ekonomi Biru

Analysis of the Social and Institutional Readiness of Fishermen in Kurau Village in the Implementation of the Blue Economy

Lizha Dwi Mulya Putri[1*], Dareen Nadya Rema[2], Azizah[1], Dinda Mardiani Lubis[1], Hanisa[1], Ilham Firdaus[1], Indah Citra Islamiyah[2], Gilang Putra Amuria[2]

[1] Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian Perikanan dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, 33172
[2] Program Studi Perikanan Tangkap, Fakultas Pertanian Perikanan dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia 33172
[*]Korespondensi: lizha_dwi@ubb.ac.id

Copyright ©2026, Author. Published by the Fisheries Science Study Program, Faculty of Science and Technology, Muhammadiyah University, Sidenreng Rappang, Article Info: Posted: July 20, 2026 Revised: September 14, 2026; Accepted: October 19, 2026; Published: October 25, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat nelayan Desa Kurau dalam mendukung implementasi ekonomi biru serta mengidentifikasi strategi penguatannya. Penelitian dilaksanakan di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pada Juli–Oktober 2025. Data diperoleh melalui survei dan wawancara terhadap 40 nelayan pengguna alat tangkap jaring, bagan, pancing, dan bubu, dengan masing-masing kelompok diwakili 10 responden. Analisis dilakukan menggunakan metode skoring berdasarkan lima dimensi, yaitu pengetahuan & pemahaman ekonomi biru, partisipasi masyarakat, keberadaan & kekuatan lembaga lokal, legalitas & struktur organisasi, serta akses terhadap pembiayaan & pendampingan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan secara keseluruhan sebesar 2,45 dan termasuk kategori *approaching readiness,* artinya masyarakat cukup siap tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, legalitas organisasi, dan akses pembiayaan. Dimensi dengan skor tertinggi adalah partisipasi masyarakat sebesar 2,90, sedangkan terendah adalah legalitas dan struktur organisasi sebesar 2,12. Berdasarkan alat tangkap, kelompok bagan memiliki skor kesiapan tertinggi sebesar 2,87, diikuti pancing sebesar 2,68, bubu sebesar 2,52, dan jaring sebesar 1,72. Analisis SWOT menempatkan nelayan Desa Kurau pada Kuadran I (*Strengths–Opportunities*) dengan koordinat (0,71; 0,56). Strategi SO memperoleh peringkat pertama dengan skor 4,36, sehingga strategi prioritas diarahkan pada pembentukan dan legalisasi koperasi nelayan dengan memanfaatkan modal sosial dan dukungan pemerintah, disertai penguatan jejaring, informasi pasar, literasi, kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan, terutama bagi kelompok jaring. Strategi tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan nelayan dalam mendukung implementasi ekonomi biru yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Desa Kurau, ekonomi biru, kelembagaan nelayan, kesiapan sosial, SWOT

Abstract

This study aimed to analyze the level of social and institutional readiness of fishing communities in Kurau Village to support blue economy implementation and to identify strategies for strengthening it. The study was conducted in Kurau Village, Koba District, Central Bangka Regency, from July to October 2025. Data were collected through surveys and interviews with 40 fishers using gillnets, lift nets, hook and line, and traps, with 10 respondents representing each fishing gear group. Analysis was conducted using a scoring method based on five dimensions: blue economy knowledge and understanding, community participation, existence and strength of local institutions, legality and organizational structure, and access to financing and technical assistance. The results showed that the overall social and institutional readiness score was 2.45, categorized as approaching readiness, indicating that the

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

community was relatively prepared but still required improvements in institutional capacity, organizational legality, and access to financing. Community participation had the highest score (2.90), while legality and organizational structure had the lowest score (2.12). By fishing gear, lift-net fishers had the highest readiness score (2.87), followed by hook-and-line fishers (2.68), trap fishers (2.52), and gillnet fishers (1.72). SWOT analysis placed Kurau fishers in Quadrant I (Strengths–Opportunities) with coordinates of (0.71; 0.56). The SO strategy ranked first with a score of 4.36, prioritizing the establishment and legalization of a fishers' cooperative by leveraging social capital and government support, strengthening networks and market information, and improving literacy, managerial capacity, and access to financing, particularly for gillnet fishers. This strategy is expected to strengthen fishers' readiness to support an inclusive, self-reliant, and sustainable blue economy.

Keywords: *Kurau Village, blue economy, fishermen's institutions, social readiness, SWOT*

PENDAHULUAN

Transformasi menuju ekonomi biru merupakan paradigma baru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menempatkan keberlanjutan sebagai landasan utama. Penerapan paradigma ini menuntut perubahan pada sistem produksi, distribusi, dan kelembagaan yang mendukung kegiatan perikanan (Kusdiantoro *et al.,* 2019). Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempopulerkan konsep ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penghidupan masyarakat, dan kesehatan ekosistem (World Bank & United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017). Konsep tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 14 tentang ekosistem laut (United Nations, 2015). Di Indonesia, ekonomi biru diterapkan melalui sejumlah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Pada tingkat lokal, kesiapan sosial dan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan ekonomi biru. Masyarakat nelayan yang belum siap dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem produksi dan pengelolaan perikanan yang mengutamakan keberlanjutan (Wahyuni *et al.,* 2025).

Desa Kurau merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Tengah dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang beragam. Kondisi sosial dan kelembagaan nelayan di desa ini juga menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Penguatan kelembagaan nelayan di Desa Kurau masih menghadapi beberapa kendala. Akses terhadap pembiayaan formal masih terbatas, sebagian kelembagaan belum memiliki legalitas yang lengkap, dan kapasitas manajerial kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman nelayan mengenai prinsip ekonomi biru, seperti pengelolaan berbasis ekosistem, efisiensi penggunaan alat tangkap, diversifikasi usaha, dan pengurangan dampak lingkungan, juga belum optimal (Sana, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan ekonomi biru dan kesiapan nelayan sebagai pelaksana di tingkat lokal. Kesiapan nelayan Desa Kurau juga belum seragam. Sebagian besar nelayan bagan dan pancing telah tergabung dalam kelompok atau Kelompok Usaha Bersama (KUB), sedangkan sebagian besar nelayan jaring masih bekerja secara individual. Perbedaan

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

tersebut menunjukkan perlunya pengukuran kesiapan yang mempertimbangkan karakteristik setiap jenis alat tangkap. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab dua permasalahan, yaitu belum tersedianya ukuran kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau berdasarkan dimensi dan jenis alat tangkap serta belum tersusunnya strategi penguatan yang didasarkan pada hasil pengukuran tersebut.

Evans *et al.* (2023) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat pesisir merupakan aspek penting dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan juga diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapannya pada tingkat lokal. Penelitian mengenai kesiapan ekonomi biru pada masyarakat pesisir menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan, kesadaran lingkungan, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat saling berkaitan dalam membentuk kesiapan untuk menerapkan ekonomi biru (Alhowaish, 2026).

Penelitian mengenai kesiapan ekonomi biru pada masyarakat nelayan di tingkat lokal masih terbatas, khususnya penelitian yang mengukur aspek sosial dan kelembagaan secara bersamaan. Aspek tersebut mencakup pengetahuan tentang ekonomi biru, partisipasi masyarakat, keberadaan dan kekuatan lembaga lokal, legalitas dan struktur organisasi, serta akses terhadap pembiayaan dan pendampingan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengukur lima dimensi kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau serta membandingkan tingkat kesiapan berdasarkan jenis alat tangkap.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau dalam mendukung penerapan ekonomi biru berdasarkan lima dimensi penilaian; (2) membandingkan tingkat kesiapan nelayan berdasarkan jenis alat tangkap; dan (3) merumuskan strategi penguatan sosial dan kelembagaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang teridentifikasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama Juli–Oktober 2025. Desa Kurau dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kawasan aktivitas perikanan tangkap dengan penggunaan alat tangkap yang beragam.

Pendekatan dan jenis data

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan nelayan pengguna alat tangkap jaring, bagan, pancing, dan bubu. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, laporan statistik perikanan, serta literatur pendukung terkait ekonomi biru dan kelembagaan nelayan. Indikator kesiapan sosial dan kelembagaan meliputi: pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi biru, tingkat

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

partisipasi masyarakat, keberadaan & kekuatan lembaga lokal, legalitas & struktur organisasi, serta akses terhadap pembiayaan & pendampingan teknis. Data primer dianalisis melalui dua tahapan, yaitu analisis kuantitatif terhadap hasil kuesioner dan analisis kualitatif terhadap hasil wawancara. Data kuesioner diolah menjadi skor kesiapan sosial dan kelembagaan berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang disajikan pada Tabel 1, sedangkan data wawancara dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan analisis SWOT (Tabel 2). Sementara itu, data sekunder tidak dilakukan pembobotan atau penskoran, tetapi digunakan sebagai data pendukung untuk mendeskripsikan kondisi perikanan di Desa Kurau serta memperkuat interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dengan teknik purposive sampling dengan sistem kuota. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu nelayan aktif yang telah menjalankan usaha penangkapan ikan selama minimal tiga tahun. Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai mengenai kondisi sosial, kelembagaan, dan praktik penangkapan ikan di Desa Kurau.

Penentuan kuota dilakukan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan, yaitu jaring, bagan, pancing, dan bubu. Masing-masing kelompok alat tangkap ditetapkan sebanyak 10 responden, sehingga jumlah sampel keseluruhan sebanyak 40 nelayan. Penetapan jumlah yang sama pada setiap kelompok dilakukan untuk memungkinkan perbandingan tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan antarjenis alat tangkap. Pemilihan responden pada masing-masing kelompok tetap mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Keragaman responden berdasarkan jenis alat tangkap dapat memperkaya data dan mendukung analisis penelitian (Wulandari et al., 2022).

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui diskusi informal dan observasi lapangan untuk memastikan konsistensi dan ketepatan data.

Analisis data

Indeks kesiapan sosial dan kelembagaan

Indeks kesiapan sosial dan kelembagaan digunakan untuk menggambarkan kapasitas masyarakat dalam menerima dan menjalankan perubahan atau intervensi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep *readiness* dalam konteks masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup kondisi kelembagaan, partisipasi, kapasitas adaptif, dan dukungan tata kelola. Evans *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dan keterlibatan komunitas merupakan unsur penting dalam implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Studi terbaru mengenai blue economy readiness juga menunjukkan bahwa kondisi

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

kelembagaan, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dalam membentuk kesiapan implementasi pada tingkat lokal (Alhowaish, 2026). Kesiapan sosial dan kelembagaan menjadi aspek krusial dalam transisi menuju ekonomi biru, di mana penilaian kesiapan ini mencakup infrastruktur sosial, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat (Najib et al., 2024). Misalnya, dalam pengembangan instrumen *Readiness to Train Assessment Tool* (RTAT), peneliti memperoleh skor kesiapan dengan menghitung nilai rata-rata dari beberapa sub-skala yang merepresentasikan berbagai aspek kesiapan. Metode yang sama diadaptasi dalam analisis kesiapan masyarakat nelayan untuk memastikan bahwa mereka siap menerima intervensi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan (Wulandari *et al.,* 2022). Dalam penelitian ini, prinsip pengukuran tersebut diadopsi dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat nelayan dalam menerima dan menjalankan model usaha perikanan berbasis ekonomi biru. Skor rata-rata responden dipandang sebagai indikator agregat yang dapat menggambarkan kesiapan kolektif suatu komunitas dalam menghadapi perubahan atau intervensi berbasis pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan.

Skoring kesiapan sosial dan kelembagaan

Instrumen survei disusun berdasarkan lima dimensi berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi biru
   Subkriteria: pemahaman tentang efisiensi sumber daya, pentingnya konservasi laut, diversifikasi hasil perikanan, dan keterkaitan keberlanjutan dengan kesejahteraan jangka panjang.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha bersama
   Subkriteria: keterlibatan dalam kegiatan kelompok, kerja sama antaranggota, dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan bersama.
3. Keberadaan & kekuatan lembaga lokal (koperasi, kelompok usaha bersama)
   Subkriteria: keberadaan kelompok atau KUB, keaktifan koperasi, dan kemampuan lembaga mengoordinasikan kegiatan ekonomi nelayan.
4. Legalitas dan struktur organisasi kelembagaan
   Subkriteria: akta pendirian, pengesahan dari instansi pemerintah, dan struktur kepengurusan yang terdokumentasi.
5. Akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis
   Subkriteria: sumber modal (pribadi, tengkulak, atau lembaga formal), bantuan pemerintah daerah, serta pelatihan dan pendampingan teknis.

Rumus skoring kesiapan:

$$S_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} x_{ij}}{n}$$

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

Keterangan:

Si : Skor kesiapan pada responden ke-i

xij : Nilai skor pada indikator ke-j

n : Jumlah indikator

Nilai skor dikategorikan menjadi:

1,00 – 2,33 : Menunjukkan *developing readiness*, artinya kesiapan rendah hingga sedang, masih perlu peningkatan.

2,34 – 3,67 : *Approaching readiness*, kesiapan sudah cukup, tetapi belum optimal.

3,68 – 5,00 : *Full readiness*, masyarakat sudah sangat siap dan mendukung implementasi.

Setiap subkriteria dinilai dengan skala 1–5, dengan skor 1 untuk kondisi paling rendah dan skor 5 untuk kondisi paling tinggi. Rentang kelas kategori dihitung dari (5 − 1) : 3 = 1,33, sehingga terbentuk tiga kelas kesiapan seperti di atas.

Analisis SWOT sosial-kelembagaan

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau. Data SWOT diperoleh melalui wawancara dengan nelayan aktif, pengurus kelembagaan lokal, dan tokoh masyarakat. Faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Hasil identifikasi faktor tersebut digunakan untuk menyusun alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT. Faktor-faktor yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan hasil skoring lima dimensi kesiapan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kondisi empiris masyarakat nelayan.

Peneliti menghitung posisi strategis dengan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*). Setiap faktor diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, dengan jumlah bobot faktor internal sebesar 1,00 dan jumlah bobot faktor eksternal sebesar 1,00. Setiap faktor juga diberi rating 1–5 sesuai besar pengaruhnya terhadap kesiapan nelayan, dengan 5 sebagai pengaruh terbesar. Responden memberikan bobot dan rating tersebut. Skor setiap faktor adalah bobot dikalikan rating. Prioritas strategi ditentukan dengan menjumlahkan skor faktor yang membentuk setiap strategi (SO, WO, ST, dan WT). Jumlah skor terbesar menempati peringkat pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Tingkat Kesiapan Sosial dan Kelembagaan (*Readiness*)

Analisis kesiapan sosial dan kelembagaan bertujuan untuk mengukur kesiapan (*readiness*) masyarakat nelayan di Desa Kurau dalam mengadopsi dan mengimplementasikan model usaha perikanan tangkap berbasis ekonomi biru. Evaluasi ini penting karena keberhasilan implementasi

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

ekonomi biru tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Evaluasi terhadap berbagai dimensi sosial-kelembagaan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan program yang berorientasi pada masyarakat (Abdul Majid *et al.*, 2022). Dengan demikian, analisis *readiness* memberikan gambaran awal mengenai kondisi aktual masyarakat serta aspek-aspek yang memerlukan penguatan sebelum intervensi program dijalankan. Analisis ini didasarkan pada data survei dan wawancara yang mengukur lima dimensi utama kesiapan, sesuai dengan metodologi penelitian. Dimensi tersebut meliputi: (1) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Ekonomi Biru, (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat, (3) Keberadaan & Kekuatan Lembaga Lokal, (4) Legalitas & Struktur Organisasi, dan (5) Akses terhadap Pembiayaan & Pendampingan Teknis. Hasil skoring rata-rata dari kuesioner disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Skor rata-rata dimensi kesiapan sosial dan kelembagaan kelompok nelayan Desa Kurau

Kelompok Nelayan	Dimensi					Rata-Rata
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Ekonomi Biru	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Keberadaan dan Kekuatan Lembaga Lokal	Legalitas dan Struktur Organisasi	Akses terhadap Pembiayaan dan Pendampingan Teknis	
Jaring	2,02	2,38	1,36	1,32	1,54	1,72
Bagan	3,42	3,30	2,52	2,32	2,78	2,87
Pancing	2,84	3,08	2,68	2,38	2,40	2,68
Bubu	2,48	2,82	2,54	2,46	2,32	2,52
Rata-Rata	2,69	2,90	2,28	2,12	2,26	2,45
Kategori	*Approaching readiness*	*Approaching readiness*	*Developing readiness*	*Developing readiness*	*Developing readiness*	*Approaching readiness*

Sumber: hasil penelitian, 2025

Pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi biru

Pada aspek pengetahuan, skor rata-rata yang diperoleh sebesar 2,69, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi biru masih dalam kategori *approaching readiness*, artinya kesiapan cukup, tetapi masih belum optimal. Menurut Henggu et al. (2025) kelompok nelayan masih memiliki pengetahuan dasar yang terbatas terkait diversifikasi hasil perikanan dan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kelompok nelayan bagan tercatat memiliki nilai tertinggi (3,42) yang menunjukkan bahwa mereka relatif telah mengenal prinsip efisiensi sumber daya dan pentingnya konservasi laut. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sebaliknya, kelompok jaring memperoleh nilai terendah (2,02), yang menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap konsep ekonomi biru. Sebagian besar kelompok nelayan jaring masih berorientasi pada hasil tangkapan jangka pendek dan belum memahami keterkaitan antara keberlanjutan sumber daya ikan dengan kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan program edukasi dan pelatihan

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai ekonomi biru sangat penting, untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang keberlanjutan sumber daya perikanan di kalangan masyarakat nelayan (Rahim *et al.*, 2025). Dimensi lain yang dapat menopang peningkatan pemahaman nelayan adalah partisipasi masyarakat, akses terhadap pendampingan teknis, dan keberadaan lembaga lokal. Urutan skor pengetahuan pada keempat kelompok (bagan 3,42; pancing 2,84; bubu 2,48; jaring 2,02) sama dengan urutan skor partisipasi dan skor akses pendampingan teknis. Kesamaan urutan ini menunjukkan bahwa kelompok dengan partisipasi dan akses pendampingan yang lebih baik memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Lembaga lokal dapat menyalurkan sosialisasi dan pelatihan kepada anggotanya, sedangkan partisipasi nelayan dalam kegiatan kelompok (2,90) dapat mempercepat penyebaran informasi antar nelayan. Oleh karena itu, program edukasi ekonomi biru bagi kelompok nelayan jaring sebaiknya berjalan bersama pembentukan kelompok dan pendampingan teknis.

Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam kegiatan kelompok menunjukkan rata-rata skor 2,90, yang berada pada kategori *approaching readiness*. Menurut Chamidah *et al.* (2025), tingkat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kelompok bagan memiliki tingkat partisipasi tertinggi (3,30) karena pola kerja mereka menuntut kolaborasi antaranggota dalam operasional dan pengelolaan hasil tangkapan. Kegiatan gotong royong dan kebersamaan masih terjaga dengan baik di kelompok ini, kerja sama antaranggota sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sebuah komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Kelompok pancing (3,08) dan bubu (2,82) menunjukkan partisipasi cukup baik, meskipun masih terbatas pada kegiatan informal. Sementara itu, kelompok jaring (2,38) memperlihatkan partisipasi cukup walaupun masih belum optimal karena sebagian besar nelayan bekerja secara individual tanpa adanya koordinasi antaranggota kelompok. Fenomena ini menunjukkan pentingnya struktur kelembagaan yang solid untuk mendukung partisipasi yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama dapat meningkatkan solidaritas sosial dan kemampuan pengambilan keputusan (Hindayani *et al.*, 2021). Rendahnya partisipasi menurunkan solidaritas sosial dan melemahkan kemampuan kelompok dalam mengambil keputusan bersama. Kondisi ini juga menghambat kolaborasi ekonomi, sehingga pengelolaan sumber daya sering berjalan tanpa kerja sama yang efektif (Chamidah *et al.*, 2025). Modal sosial dalam kelompok usaha bersama (KUBE) dapat mendorong solidaritas dan kerja sama di antara anggotanya (Restu Wilujeng *et al.*, 2021). Dinamika kelompok dan kelembagaan juga berkontribusi pada resiliensi komunitas nelayan (Fernanto *et al.*, 2022).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini berkaitan dengan keberadaan lembaga lokal serta legalitas dan struktur organisasi. Kelembagaan yang memiliki struktur dan pembagian peran yang lebih jelas dapat menyediakan ruang partisipasi yang lebih terorganisasi. Sebaliknya, kelembagaan yang

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

belum formal dapat membatasi keterlibatan anggota pada kegiatan yang bersifat informal. Akses pembiayaan dan pendampingan teknis juga dapat menjadi faktor pendukung karena kegiatan pendampingan menciptakan ruang interaksi, pembelajaran, dan pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan secara keseluruhan. Dimensi pendukung yang paling jelas pada data ini adalah akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis. Urutan skor partisipasi pada keempat kelompok (bagan 3,30; pancing 3,08; bubu 2,82; jaring 2,38) sama dengan urutan skor akses pendampingan (2,78; 2,40; 2,32; 1,54). Karena itu, kegiatan pendampingan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan partisipasi nelayan jaring, yang skornya (2,38) paling rendah di antara keempat kelompok.

Keberadaan dan kekuatan lembaga lokal

Aspek kelembagaan nelayan memperoleh skor rata-rata 2,28, yang berarti sebagian besar kelompok nelayan masih dalam tahap penguatan struktur internal dan peran organisasi. Hanya kelompok nelayan seperti nelayan pancing (2,68), nelayan bagan (2,52) dan nelayan bubu (2,54), yang mulai memiliki kelompok informal untuk kegiatan usaha bersama. Sebaliknya, nelayan jaring (1,36) mencerminkan kurangnya lembaga aktif yang mengoordinasikan kegiatan ekonomi nelayan. Kelemahan dalam pengelolaan kelembagaan dapat menghambat kemampuan masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya secara efektif (Sutisna *et al.*, 2025). Kelembagaan yang lemah berimplikasi pada rendahnya kemampuan nelayan mengatur sumber daya secara kolektif, termasuk dalam distribusi hasil tangkapan, pembelian bahan bakar, serta pengelolaan bantuan. Tanpa adanya organisasi formal yang efektif, nelayan akan kesulitan untuk mencapai kesepakatan dalam pembelian dan distribusi, oleh karena itu penguatan lembaga lokal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan ekonomi komunitas nelayan (Taruna, 2025).

Legalitas dan struktur organisasi

Aspek legalitas dan struktur organisasi juga masih tergolong lemah, dengan skor rata-rata 2,12. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok nelayan belum memiliki pengesahan hukum, akta pendirian, atau struktur organisasi yang terdokumentasi secara formal. Kondisi ini membatasi akses nelayan terhadap program bantuan pemerintah maupun lembaga keuangan formal. Hanya sebagian kecil kelompok nelayan pancing (2,38) dan nelayan bubu (2,46) yang mulai membentuk struktur kepengurusan sederhana, meskipun belum sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga resmi. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas organisasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan di Kurau. Berdasarkan analisis ini, penting bagi peningkatan kesadaran kolektif di antara nelayan tentang manfaat formalitas dan legalitas organisasi, agar mereka dapat lebih aktif dalam mengelola sumber daya dan mendorong pengembangan ekonomi komunitas. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap legalitas organisasi dapat

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses dukungan dan sumber daya dari pemerintah serta lembaga keuangan (Aswad & Tarlani, 2023).

Akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pembiayaan dan pendampingan teknis terlihat dari skor rata-rata 2,26, yang termasuk dalam kategori *developing readiness*. Sebagian besar nelayan masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari tengkulak, yang berdampak pada ketergantungan ekonomi jangka panjang. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan dapat mengakibatkan dampak signifikan pada aktivitas perikanan dan kesejahteraan pemangku kepentingan di sektor ini (Manzilati *et al.*, 2023). Kelompok bagan (2,78) dan kelompok pancing (2,40) relatif lebih baik karena telah menerima beberapa bentuk bantuan dari pemerintah daerah, seperti program perawatan alat tangkap ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar. Sebaliknya, kelompok jaring (1,54) dan bubu (2,32) belum banyak tersentuh oleh kegiatan pendampingan atau pelatihan teknis, sehingga tingkat adaptasi terhadap inovasi teknologi masih rendah. Di dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam mendukung kelompok yang masih terpinggirkan agar meningkatkan akses terhadap pembiayaan. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan akses kredit, tetapi juga pada pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi nelayan dalam jangka panjang. Dengan demikian, menumbuhkan kesadaran dan pelatihan yang tepat dapat membantu memfasilitasi transisi ke praktik perikanan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka terhadap perubahan pasar dan kondisi lingkungan.

Keterkaitan antar dimensi kesiapan

Kelima dimensi kesiapan saling berkaitan, sehingga skor setiap dimensi perlu dibaca bersama dimensi lainnya. Partisipasi masyarakat (2,90), dimensi dengan skor tertinggi, berperan sebagai modal awal. Keterlibatan nelayan dalam kegiatan kelompok memberi dasar bagi terbentuknya lembaga lokal (2,28). Lembaga lokal yang berjalan membutuhkan legalitas dan struktur organisasi (2,12) agar memperoleh pengakuan resmi. Legalitas tersebut kemudian membuka akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis (2,26) dari pemerintah dan lembaga keuangan. Pendampingan teknis selanjutnya memperluas pengetahuan nelayan tentang ekonomi biru (2,69), dan pengetahuan yang lebih baik mendorong nelayan terlibat lebih aktif dalam kegiatan kelompok.

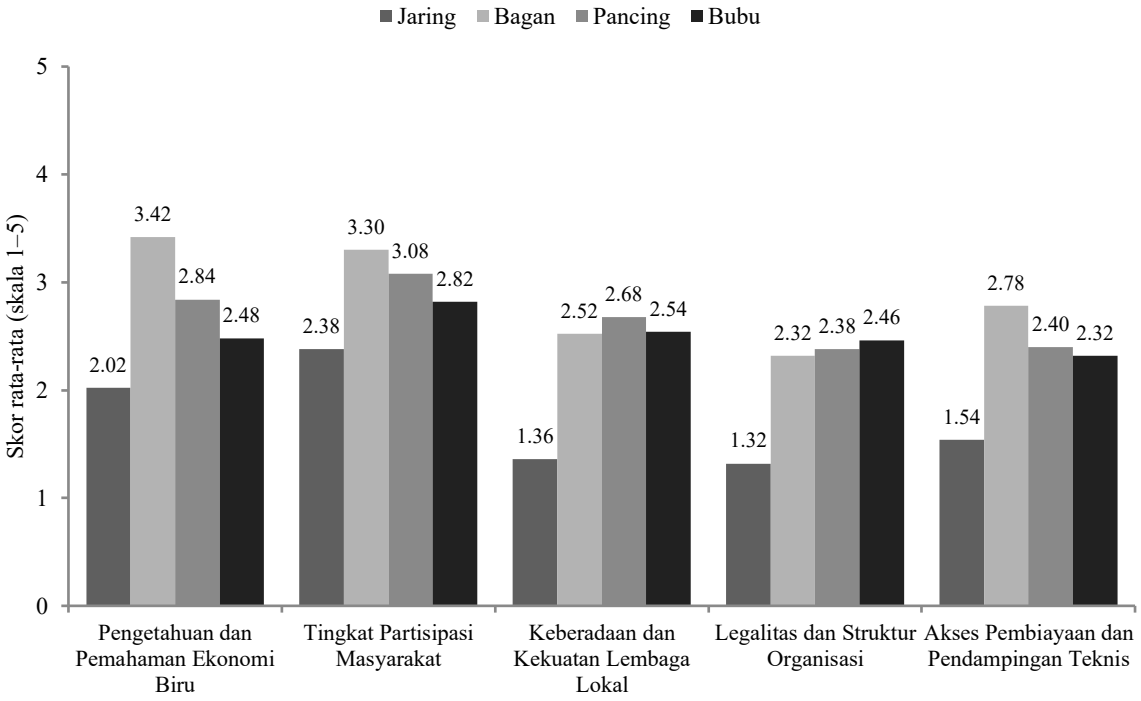
Data antar kelompok alat tangkap memperlihatkan keterkaitan tersebut. Urutan skor pada ketiga dimensi tersebut relatif sama, yaitu bagan, pancing, bubu, lalu jaring. Pola deskriptif ini mengindikasikan adanya kecenderungan kesamaan kondisi antardimensi, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat. Pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hubungan statistik antarvariabel tersebut.

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

Keterkaitan ini menunjukkan dimensi mana yang dapat menjadi penopang ketika skor dimensi lain rendah. Partisipasi masyarakat menjadi penopang utama, karena skor dimensi ini tertinggi pada kelompok jaring, pancing, dan bubu. Keterlibatan nelayan dalam kegiatan kelompok tersebut dapat menggerakkan pembentukan kelompok dan pengurusan legalitas. Ketika legalitas belum terpenuhi, pendampingan teknis dan pembiayaan mikro berbasis kelompok dapat menjadi jalur sementara untuk memperkuat kelembagaan. Peningkatan pengetahuan perlu berjalan bersama penguatan partisipasi dan pendampingan, sebab ketiganya saling menopang. Dengan demikian, intervensi yang menyasar satu dimensi saja belum cukup untuk menaikkan kesiapan secara menyeluruh.

Perbandingan Kesiapan Antar Alat Tangkap

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan antar kelompok nelayan berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Kelompok nelayan bagan memiliki skor rata-rata kesiapan tertinggi, yaitu 2,87, diikuti oleh nelayan pancing sebesar 2,68, bubu sebesar 2,52, dan jaring sebesar 1,72. Dengan demikian, secara umum kelompok nelayan bagan menunjukkan kondisi kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan kelompok alat tangkap lainnya, sedangkan kelompok nelayan jaring memiliki tingkat kesiapan paling rendah. Perbandingan skor kelima dimensi pada setiap kelompok disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan skor kesiapan sosial dan kelembagaan pada lima dimensi menurut kelompok alat tangkap

Nelayan bagan memiliki kesiapan relatif paling tinggi karena menunjukkan nilai yang baik pada aspek pengetahuan dan pemahaman ekonomi biru (3,42) serta tingkat partisipasi masyarakat (3,30).

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

Akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis (2,78) juga tertinggi di antara keempat kelompok. Pola operasi bagan yang membutuhkan kerja sama antaranggota turut mendukung terbentuknya koordinasi dan solidaritas kelompok. Meskipun demikian, aspek legalitas dan struktur organisasi masih perlu diperkuat karena skornya hanya 2,32.

Kelompok pancing memiliki skor kesiapan sebesar 2,68. Keunggulan utama kelompok ini terdapat pada tingkat partisipasi (3,08) dan keberadaan lembaga lokal (2,68), yang tertinggi di antara keempat kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan kemampuan adaptasi yang cukup baik. Namun, pengetahuan mengenai ekonomi biru (2,84), legalitas organisasi (2,38), serta akses pembiayaan dan pendampingan teknis (2,40) masih perlu ditingkatkan agar kesiapan kelompok dapat berkembang secara lebih optimal.

Kelompok bubu memperoleh skor rata-rata 2,52. Kelompok ini memiliki kondisi yang cukup baik pada aspek partisipasi masyarakat (2,82), keberadaan dan kekuatan lembaga lokal (2,54), serta legalitas dan struktur organisasi (2,46), yang tertinggi di antara keempat kelompok. Namun, akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis masih relatif terbatas dengan skor 2,32. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan akses terhadap sumber pembiayaan dan pendampingan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesiapan kelompok nelayan bubu.

Kelompok jaring menunjukkan tingkat kesiapan terendah dengan skor rata-rata 1,72 (kategori *developing readiness*). Nilai rendah terutama terlihat pada keberadaan dan kekuatan lembaga lokal (1,36), legalitas dan struktur organisasi (1,32), serta akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis (1,54). Selain itu, pemahaman mengenai ekonomi biru juga relatif rendah dengan skor 2,02. Kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan jaring menjadi kelompok yang paling membutuhkan prioritas pembinaan, terutama melalui penguatan organisasi, peningkatan literasi ekonomi biru, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis.

Secara keseluruhan, perbedaan kesiapan antar alat tangkap menunjukkan bahwa intervensi pengembangan ekonomi biru tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Nelayan bagan dan pancing dapat diarahkan sebagai kelompok yang relatif lebih siap untuk menjadi penggerak awal, sedangkan nelayan bubu memerlukan penguatan akses pendanaan dan kelembagaan, dan nelayan jaring perlu memperoleh prioritas pembinaan yang lebih intensif. Pendekatan bertahap berdasarkan kondisi masing-masing kelompok akan lebih sesuai untuk meningkatkan kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau.

Analisis SWOT Keterkaitan Sosial dan Kelembagaan Nelayan

Analisis SWOT digunakan untuk memetakan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat nelayan dalam menghadapi penerapan model ekonomi biru. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi posisi strategis masyarakat pesisir dalam konteks pengembangan usaha perikanan

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

tangkap berkelanjutan, serta menentukan arah intervensi yang sesuai dengan kondisi sosial dan kelembagaan lokal.

Tabel 2. Matriks SWOT

***Strengths* (Kekuatan)**	***Weaknesses* (Kelemahan)**
• Adanya semangat gotong royong dan jejaring sosial antar-nelayan	• Lembaga nelayan belum memiliki legalitas dan struktur formal
• Beberapa kelompok (bagan dan pancing) sudah terbentuk dan aktif	• Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dan pendampingan teknis
• Dukungan pemerintah daerah terhadap pelatihan ekonomi biru	• Partisipasi dan kepemimpinan kelompok belum merata
• Keterbukaan terhadap inovasi dan konsep ekonomi biru.	• Ketergantungan terhadap modal informal (tengkulak).
• Kedekatan geografis dengan pelabuhan dan akses pasar.	• Kurangnya regenerasi dan keterlibatan nelayan muda.

***Opportunities* (Peluang)**	***Threats* (Ancaman)**
• Implementasi program ekonomi biru nasional dan daerah.	• Ketergantungan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga ikan.
• Peluang pembentukan koperasi nelayan berbasis ekonomi biru.	• Dampak perubahan iklim terhadap hasil tangkapan.
• Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan mikro.	• Keterbatasan sarana pendukung kelembagaan.
• Peningkatan kesadaran publik terhadap keberlanjutan sumber daya laut.	• Rendahnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan.
• Dukungan dari lembaga penelitian dan pendidikan tinggi.	• Persaingan dan tekanan dari aktivitas ekonomi lain di pesisir.

Strengths (kekuatan internal)

Faktor kekuatan mencerminkan potensi dan modal sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat nelayan di Desa Kurau, yang dapat menjadi dasar pengembangan ekonomi biru.

1. Modal sosial dan budaya gotong royong yang kuat.

   Hubungan sosial antar-nelayan di Kurau masih dilandasi rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Nilai-nilai gotong royong terlihat dalam kegiatan seperti perawatan kapal, pengoperasian alat tangkap bersama, serta pembagian hasil tangkapan. Faktor ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Hal ini memperkuat potensi kolaboratif untuk pembentukan kelembagaan yang lebih formal.
2. Adanya kelompok nelayan aktif (khususnya pada bagan dan pancing).

   Sebagian besar nelayan bagan dan pancing telah tergabung dalam kelompok informal maupun KUB (Kelompok Usaha Bersama). Kelompok ini berperan penting dalam pengorganisasian kegiatan produksi dan pemasaran hasil tangkapan.
3. Keterbukaan terhadap inovasi dan konsep ekonomi biru.

   Walaupun belum menyeluruh, beberapa nelayan telah memahami konsep keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Mereka bersedia mengikuti pelatihan, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, serta terbuka terhadap penerapan teknologi baru.

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

4. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga teknis kelautan.
   Adanya program pelatihan dan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta lembaga lain memperkuat kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan pendekatan ekonomi biru.
5. Kedekatan geografis dengan pelabuhan dan akses pasar.
   Lokasi PPI Desa Kurau yang strategis memudahkan nelayan menjual hasil tangkapan dan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan sektor swasta.

***Weaknesses* (kelemahan internal)**

Kelemahan utama masyarakat nelayan terletak pada aspek kelembagaan formal dan literasi ekonomi yang masih rendah, yang dapat menghambat penerapan ekonomi biru.

1. Lemahnya kelembagaan nelayan dan belum adanya legalitas organisasi.
   Sebagian besar kelompok nelayan belum memiliki akta pendirian atau pengesahan formal dari instansi pemerintah. Struktur organisasi masih sederhana dan belum menjalankan fungsi administrasi maupun keuangan secara sistematis.
2. Rendahnya pengetahuan dan literasi ekonomi biru.
   Skor rata-rata pengetahuan hanya mencapai 2,69 (kategori *approaching readiness*), menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan inovasi teknologi masih terbatas, terutama pada kelompok jaring dan bubu.
3. Partisipasi dan kepemimpinan kelompok belum merata.
   Walaupun semangat gotong royong cukup kuat, kepemimpinan formal di dalam kelompok masih lemah. Beberapa kelompok belum memiliki struktur kepengurusan aktif sehingga koordinasi kegiatan belum optimal.
4. Ketergantungan terhadap modal informal (tengkulak).
   Sebagian besar nelayan memperoleh modal dari tengkulak dengan sistem potong hasil, yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dan membatasi kemampuan mereka untuk mandiri secara finansial.
5. Kurangnya regenerasi dan keterlibatan nelayan muda.
   Sebagian besar nelayan adalah usia produktif tua (40–55 tahun). Minimnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor perikanan mengancam keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Opportunities (Peluang Eksternal)

Peluang mencerminkan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempercepat penguatan kesiapan sosial dan kelembagaan dalam ekonomi biru.

1. Implementasi program ekonomi biru nasional dan daerah.
   Pemerintah pusat dan daerah sedang mengembangkan kebijakan ekonomi biru melalui program pemberdayaan nelayan, konservasi laut, dan efisiensi energi. Masyarakat Kurau dapat

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

memanfaatkan program ini untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

2. Peluang pembentukan koperasi nelayan berbasis ekonomi biru.
   Kelembagaan yang kuat dapat dikembangkan menjadi koperasi nelayan formal yang mengelola produksi, keuangan, dan pemasaran berbasis prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat memperkuat posisi tawar nelayan di pasar.
3. Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan mikro.
   Munculnya lembaga keuangan yang fokus pada UMKM perikanan memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh akses pembiayaan formal dengan bunga ringan dan pendampingan manajerial.
4. Peningkatan kesadaran publik terhadap keberlanjutan sumber daya laut.
   Tren global menuju konsumsi produk perikanan berkelanjutan mendorong peningkatan permintaan terhadap hasil tangkapan yang ramah lingkungan. Ini membuka pasar baru bagi nelayan yang menerapkan prinsip ekonomi biru.
5. Dukungan dari lembaga penelitian dan pendidikan tinggi.
   Kolaborasi dengan universitas atau lembaga penelitian dapat menjadi peluang bagi pengembangan teknologi tangkap ramah lingkungan serta transfer ilmu dan pendampingan kelembagaan.

Threats (Ancaman Eksternal)

Ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau memperlambat implementasi model ekonomi biru di masyarakat pesisir.

1. Ketergantungan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga ikan.
   Struktur pasar yang masih didominasi oleh tengkulak membuat nelayan sulit menentukan harga jual. Perubahan harga bahan bakar dan hasil tangkapan menyebabkan ketidakstabilan pendapatan.
2. Dampak perubahan iklim terhadap hasil tangkapan.
   Variabilitas cuaca ekstrem, abrasi pantai, dan perubahan pola arus laut memengaruhi hasil tangkapan dan meningkatkan risiko ekonomi bagi nelayan tradisional.
3. Keterbatasan sarana pendukung kelembagaan.
   Minimnya fasilitas kantor kelompok, peralatan administrasi, dan infrastruktur komunikasi menyebabkan aktivitas kelembagaan sulit berkembang.
4. Rendahnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan.
   Banyak generasi muda memilih beralih ke sektor nonperikanan karena dianggap lebih menjanjikan, sehingga keberlanjutan kelembagaan nelayan terancam.

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

5. Persaingan dan tekanan dari aktivitas ekonomi lain di pesisir.

   Aktivitas industri, tambak, dan pariwisata di wilayah pesisir berpotensi menimbulkan konflik ruang dan menekan akses nelayan terhadap sumber daya perairan.

Tabel 3. Strategi penguatan kesiapan kelembagaan dan sosial nelayan

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Strategi yang Direkomendasikan
Strengths + *Opportunities* (Strategi SO)	- Modal sosial kuat dan kelompok aktif. - Dukungan pemerintah dan peluang program ekonomi biru. - Peluang kemitraan dengan sektor swasta dan koperasi.	Strategi penguatan kelembagaan formal berbasis komunitas: memanfaatkan solidaritas sosial dan dukungan pemerintah untuk membentuk koperasi nelayan legal yang dikelola partisipatif dan berorientasi keberlanjutan.
Weaknesses + *Opportunities* (Strategi WO)	- Lemahnya kelembagaan dan pengetahuan. - Peluang pelatihan, pendampingan, dan akses modal mikro.	Strategi peningkatan kapasitas sosial dan kelembagaan: melalui pendidikan ekonomi biru, pelatihan manajemen kelompok, dan program akses pembiayaan mikro berbasis kelompok nelayan.
Strengths + *Threats* (Strategi ST)	- Solidaritas sosial tinggi namun ancaman iklim dan pasar.	Strategi adaptif berbasis sosial: memperkuat jejaring antar nelayan dan sistem informasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim.
Weaknesses + *Threats* (Strategi WT)	- Lemahnya kelembagaan formal, keterbatasan SDM, dan fluktuasi ekonomi.	Strategi mitigasi dan pembinaan berkelanjutan: melalui dukungan teknis dari pemerintah, digitalisasi sistem kelembagaan, serta regenerasi nelayan muda.

Kemudian memberi bobot dan rating pada faktor-faktor SWOT (Tabel 2) untuk menghitung posisi strategis. Hasil perhitungan matriks IFAS disajikan pada Tabel 4 dan hasil perhitungan matriks EFAS disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Matriks IFAS (faktor internal) kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau

Kode Faktor	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	B x R
	Kekuatan (S)			
S1	Modal sosial dan budaya gotong royong yang kuat	0,13	5	0,67
S2	Adanya kelompok nelayan aktif (khususnya bagan dan pancing)	0,07	4	0,27
S3	Keterbukaan terhadap inovasi dan konsep ekonomi biru	0,09	3	0,27
S4	Dukungan pemerintah daerah dan lembaga teknis kelautan	0,11	5	0,56
S5	Kedekatan geografis dengan pelabuhan dan akses pasar	0,11	3	0,33
	Sub Jumlah	**0,51**		2,09
	Kelemahan (W)			
W1	Lemahnya kelembagaan nelayan dan belum adanya legalitas organisasi	0,09	4	0,36
W2	Rendahnya pengetahuan dan literasi ekonomi biru	0,04	4	0,18
W3	Partisipasi dan kepemimpinan kelompok belum merata	0,13	3	0,40
W4	Ketergantungan terhadap modal informal (tengkulak)	0,13	2	0,27
W5	Kurangnya regenerasi dan keterlibatan nelayan muda	0,09	2	0,18
	Sub Jumlah	**0,49**		1,38
	Total	**1,00**		3,47
	Selisih (x)			**0,71**

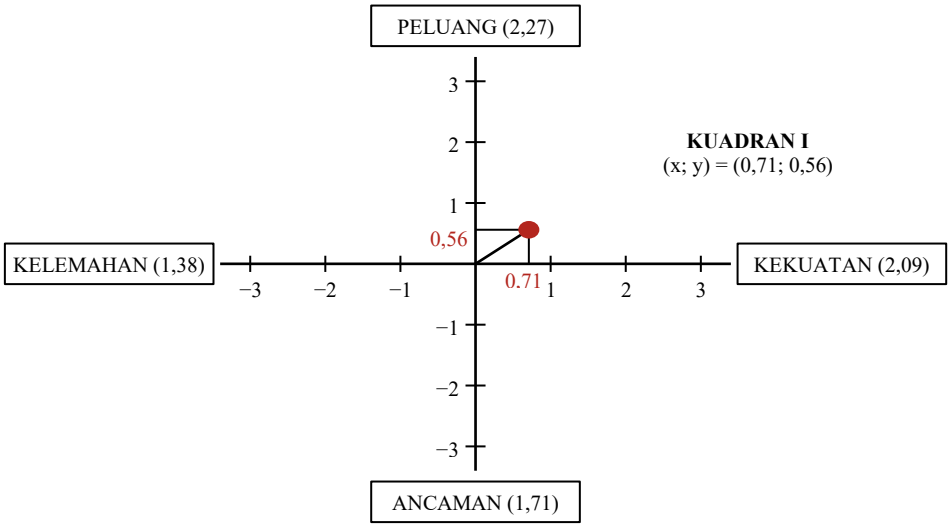
Tabel 5. Matriks EFAS (faktor eksternal) kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau

Kode Faktor	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	B x R
	Peluang (O)			

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

O1	Implementasi program ekonomi biru nasional dan daerah	0,10	5	0,52
O2	Peluang pembentukan koperasi nelayan berbasis ekonomi biru	0,13	5	0,63
O3	Kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan mikro	0,06	4	0,25
O4	Peningkatan kesadaran publik terhadap keberlanjutan sumber daya laut	0,13	4	0,50
O5	Dukungan dari lembaga penelitian dan pendidikan tinggi	0,13	3	0,38
	Sub Jumlah	**0,54**		2,27
	Ancaman (T)			
T1	Ketergantungan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga ikan	0,13	5	0,63
T2	Dampak perubahan iklim terhadap hasil tangkapan	0,13	4	0,50
T3	Keterbatasan sarana pendukung kelembagaan	0,08	3	0,25
T4	Rendahnya minat generasi muda terhadap profesi nelayan	0,04	2	0,08
T5	Persaingan dan tekanan dari aktivitas ekonomi lain di pesisir	0,08	3	0,25
	Sub Jumlah	**0,46**		1,71
	Total	**1,00**		3,98
	Selisih (y)			**0,56**

Total skor kekuatan sebesar 2,09 dan total skor kelemahan sebesar 1,38, sehingga nilai sumbu x adalah 0,71. Total skor peluang sebesar 2,27 dan total skor ancaman sebesar 1,71, sehingga nilai sumbu y adalah 0,56. Koordinat (0,71; 0,56) tersebut berada pada Kuadran I (x > 0; y > 0), seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram kuadran SWOT

Pada faktor internal, kekuatan dengan skor tertinggi adalah modal sosial dan budaya gotong royong (S1; 0,67), diikuti dukungan pemerintah daerah dan lembaga teknis kelautan (S4; 0,56). Kelemahan dengan skor tertinggi adalah partisipasi dan kepemimpinan kelompok yang belum merata (W3; 0,40) serta lemahnya kelembagaan dan belum adanya legalitas organisasi (W1; 0,36). Pola ini

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

sejalan dengan hasil skoring kesiapan, yaitu partisipasi menjadi dimensi dengan skor tertinggi (2,90), sedangkan legalitas dan struktur organisasi menjadi dimensi terendah (2,12). Pada faktor eksternal, peluang dengan skor tertinggi adalah pembentukan koperasi nelayan berbasis ekonomi biru (O2; 0,63) dan implementasi program ekonomi biru nasional dan daerah (O1; 0,52). Ancaman dengan skor tertinggi adalah ketergantungan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga ikan (T1; 0,63) serta dampak perubahan iklim terhadap hasil tangkapan (T2; 0,50).

Kuadran I menggambarkan kondisi ketika kekuatan internal melebihi kelemahan dan peluang eksternal melebihi ancaman. Strategi yang sesuai pada kuadran ini adalah strategi agresif (*growth*), yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang yang tersedia. Dalam konteks Desa Kurau, modal sosial dan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membentuk koperasi nelayan, yang merupakan peluang dengan skor tertinggi. Selisih nilai sumbu x (0,71) dan sumbu y (0,56) tergolong tidak besar, sehingga kelemahan dan ancaman belum dapat diabaikan. Kondisi ini selaras dengan kategori *approaching readiness* (2,45), yaitu masyarakat sudah cukup siap tetapi legalitas, kelembagaan lokal, serta akses pembiayaan dan pendampingan teknis masih berada pada kategori *developing readiness*. Jumlah skor setiap strategi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Prioritas strategi berdasarkan jumlah skor faktor SWOT

Alternatif	Strategi	Unsur yang dijumlahkan	Jumlah skor	Peringkat
1	SO: penguatan kelembagaan formal berbasis komunitas	ΣS + ΣO = 2,09 + 2,27	4,36	**1**
2	WO: peningkatan kapasitas sosial dan kelembagaan	ΣW + ΣO = 1,38 + 2,27	3,65	**3**
3	ST: strategi adaptif berbasis sosial	ΣS + ΣT = 2,09 + 1,71	3,80	**2**
4	WT: mitigasi dan pembinaan berkelanjutan	ΣW + ΣT = 1,38 + 1,71	3,09	**4**

Strategi SO menempati peringkat pertama dengan jumlah skor 4,36, diikuti strategi ST (3,80), WO (3,65), dan WT (3,09). Hasil ini menguatkan strategi SO sebagai prioritas utama, sejalan dengan posisi nelayan pada Kuadran I. Strategi ST berada pada peringkat kedua karena ancaman berupa ketergantungan terhadap tengkulak dan perubahan iklim memiliki skor yang tinggi, sehingga penguatan jejaring dan sistem informasi pasar perlu menyertai pembentukan koperasi. Strategi WO berada pada peringkat ketiga, tetapi tetap relevan bagi kelompok jaring dan bubu yang skor kesiapannya masih rendah pada aspek pengetahuan, kelembagaan, dan pembiayaan. Pendampingan dalam bentuk pembentukan koperasi dapat memberi peluang kepada nelayan untuk meningkatkan posisi tawar di pasar (Septya *et al.*, 2020).

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

Berdasarkan hasil tersebut, strategi penguatan kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau difokuskan pada tiga hal berikut.

1. Pembentukan dan legalisasi koperasi nelayan dengan memanfaatkan modal sosial dan dukungan pemerintah (strategi SO).
2. Penguatan jejaring antar-nelayan dan sistem informasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menghadapi perubahan iklim (strategi ST).
3. Peningkatan literasi ekonomi biru dan kapasitas manajerial serta integrasi bantuan teknis dan akses pembiayaan mikro, dimulai dari kelompok jaring (strategi WO).

Dengan penerapan strategi tersebut, masyarakat nelayan Desa Kurau dapat memperkuat kesiapan sosial dan kelembagaan mereka dalam mendukung transformasi menuju ekonomi biru yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Penekanan pada legalitas dan peningkatan kapasitas merupakan langkah krusial, karena legalitas usaha yang kuat juga meningkatkan akses nelayan terhadap sumber pembiayaan (Watulfa & Fithria, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan sesuai dengan tujuannya. Pertama, tingkat kesiapan sosial dan kelembagaan nelayan Desa Kurau berada pada kategori *approaching readiness* dengan skor rata-rata 2,45. Partisipasi masyarakat menjadi dimensi tertinggi (2,90), sedangkan legalitas dan struktur organisasi menjadi dimensi terendah (2,12). Kedua, kesiapan berbeda antar kelompok alat tangkap. Nelayan bagan memperoleh skor tertinggi (2,87), diikuti nelayan pancing (2,68), bubu (2,52), dan jaring (1,72). Ketiga, analisis SWOT menempatkan nelayan Desa Kurau pada Kuadran I (*Strengths–Opportunities*) dengan koordinat (0,71; 0,56), dan strategi SO memperoleh peringkat pertama dengan jumlah skor 4,36. Karena itu, strategi prioritas adalah memanfaatkan modal sosial dan dukungan pemerintah untuk membentuk dan melegalkan koperasi nelayan, disertai penguatan jejaring dan informasi pasar serta peningkatan literasi, kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan. Strategi tersebut perlu dimulai dari kelompok jaring yang kesiapannya paling rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan melalui skema Hibah Riset Internal Penelitian Muda Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan SK Rektor Nomor 3.1/UN50/SP/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, bantuan data, serta dukungan teknis selama proses penelitian berlangsung.

Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan
E-ISSN : 2776-9887
Vol. 6 No. 2 Oktober 2026 : 201-221
DOI: *https://doi.org/10.55678/jikan.v6i2.3013*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, Niswah, F. M., Rohmah, L., & Pratiwi, E. R. (2022). The priority problems and solutions of waqf for micro business capital to increase farmer's productivity in Lamongan East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9*(6), 913–922. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp913-922

Alhowaish, A. K. (2026). Blue economy readiness and community engagement in Qatif city, Saudi Arabia. *Frontiers in Marine Science, 13*, 1741296. https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1741296

Aswad, N., & Tarlani. (2023). Kesiapan Desa Cipamekar menuju desa wisata di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning, 3*(2), 503–512. https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8595

Chamidah, N., Rosyidi, M. I., Putra, A. A., & Suwarno, P. (2025). The role of communication in structuring religionists and the military for blue economy development. *NYIMAK: Journal of Communication, 9*(1), 51–59. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak

Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science, 4*, 1032204. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204

Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik – Dialogue, 4*(1), 194–214. https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659

Henggu, K. U., Umbu, E., Retang, K., van Kaleka, L., Nahu, Y. H., Wora, U. D., Ndahawali, S., Indah, R. H., & Njanji, U. (2025). Pemberdayaan kemitraan masyarakat dalam rangka penguatan hilirisasi ekonomi biru melalui diversifikasi produk perikanan pada kelompok perempuan nelayan KUB Parma Bahari. *Community Development Journal, 6*(1), 571–578. https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40935

Hindayani, P., Pratama, A. R., & Anna, Z. (2021). Strategi prospektif pengembangan dalam ekowisata Waduk Cirata yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan, 19*(3), 620–629. https://doi.org/10.14710/jil.19.3.620-629

Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia: Potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 14*(2), 145. https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056

Manzilati, A., Sari, Y., Suprayogi, S., & Efani, A. (2023). The effect of credit access on food security of small fishermen in East Java. *HABITAT, 34*(2), 132–140. https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.2.12

Najib, M. A., Suryana, A. A. H., Iskandar, I., & Nurhayati, A. (2024). Analisis strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan masyarakat nelayan di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 19(1):101.* https://doi.org/10.15578/jsekp.v19i1.13563

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.*

Rahim, A. R., Aminin, & Utami, D. R. (2025). Pendampingan budidaya rumput laut *Gracilaria verrucosa* pada siswa Madrasah Aliyah (MA) Lamongan. *DedikasiMU (Journal of Community Service), 7*(3).

Restu Wilujeng, P., Pratama Saputra, P., Rahman, B., Febriani, L., & Hayati, L. (2021). Social capital in fishermen livelihood: Case study in "Kelompok Usaha Bersama" (KUBE) Ketapang, Pangkalpinang, Bangka. *Jurnal Sosiologi Reflektif, 16*(1).

Sana, I. N. L. (2025). Strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan di destinasi wisata alam Indonesia. *Mandalika Journal of Business and Management Studies, 3*(1). https://journal.institutemandalika.com/index.php/mjbm

Septya, F., Mumpuni Ngesti, S., & Ramadona, T. (2020). Strategi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat nelayan Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal TECHNO-FISH Vol. IV No. 1.*

Sutisna, N., Firdaus, M. A., & Sundarta, M. I. (2025). Legal frameworks for sustainable blue economy: Harmonizing maritime resource governance and environmental protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1566*(1), 012005. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012005

Taruna, R. A. I. (2025). Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan di sektor perikanan Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 3*(3), 84–95. https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5452

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). United Nations General Assembly.

Wahyuni, S., Mursawal, A., & Kurniawan, R. (2025). Strategi pengelolaan berkelanjutan laut dan pulau-pulau kecil: Tinjauan terhadap pendekatan ekologis, sosial, dan kebijakan. *South East Asian Management Concern (SEAMAC), 2*(2), 71–78.

Watulfa, D. C., & Fithria, A. (2025). Optimalisasi pencatatan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM untuk mendorong kemandirian finansial. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 6*(2), 592–602. https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23695

World Bank, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries.* World Bank.

Wulandari, A., Shohibuddin, M., & Satria, A. (2022). Strategi adaptasi rumah tangga nelayan dalam menghadapi dampak abrasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 17*(2), 269. https://doi.org/10.15578/jsekp.v17i2.10364